

1. ACCOUNTING
2. FINANCIAL STATEMENTS

KK
A 205/01
Ven
a

**ANALISIS INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN
SEBAGAI ALAT PENILAI TINGKAT KINERJA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
Studi Kasus pada PT. Perkebunan 'X' (Persero)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Diajukan Oleh :

LINTANG VENUSITA
No. Pokok : 049510736 E

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

SKRIPSI

**ANALISIS INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN
SEBAGAI ALAT PENILAI TINGKAT KINERJA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
Studi Kasus pada PT. Perkebunan 'X' (Persero)**

DIAJUKAN OLEH :
LINTANG VENUSITA
No. Pokok : 049510736E



TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. Soetedjo".

Dr. H. SOEGENG SOETEDJO, SE., Ak.,

TANGGAL 1/8/2001

KETUA PROGRAM STUDI,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arsono Laksmiana".

Dr. ARSONO LAKSMANA, SE., Ak.,

TANGGAL

ABSTRAKSI

Keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan tugas dapat dilihat dari kemampuan manajemen dalam mengevaluasi pelaksanaan dimasa lalu dan melihat kemungkinan serta kesempatan di masa mendatang baik jangka pendek maupun jangka panjang, selain itu keberhasilan suatu perusahaan juga dapat dilihat dari informasi akuntansi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Selain informasi akuntansi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, informasi non keuangan juga diperlukan dan harus dapat dipahami oleh penggunanya sehingga akan mencapai sasaran yang diharapkan. Oleh sebab itu diperlukan analisis dan interpretasi yang melibatkan penilaian masa lalu, sekarang dan yang akan datang dengan tujuan untuk menemukan kelemahan - kelemahan dalam kinerja perusahaan yang dapat menyebabkan masalah di masa mendatang dan untuk menentukan kekuatan - kekuatan perusahaan yang dapat diandalkan.

Demikian pula dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meskipun tujuan BUMN harus tetap mengacu pada program pemerintah yaitu ikut berpartisipasi menunjang berhasilnya pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun BUMN juga mengutamakan perolehan laba, maka dari itu analisis laporan keuangan BUMN juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kinerja BUMN.

Dengan berkembangnya perekonomian dunia maka sarana sistem penilaian tingkat kinerja BUMN juga perlu disesuaikan dengan sistem penilaian yang mengacu pada standar korporasi dunia sehingga mendorong BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Oleh karena itu pada tanggal 27 September 1999 dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Kepala Badan Pembina BUMN, Nomor : KEP-215/ M-PBUMN/ 1999 yang berisi tentang tata cara penilaian tingkat kinerja BUMN, sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 198/ KMK.016/ 1998 tanggal 24 Maret 1998 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN.

Meskipun Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/ Kepala Badan Pembina BUMN, Nomor : KEP-215/ M-PBUMN/ 1999 tentang tata cara penilaian tingkat kinerja BUMN dapat digunakan sebagai alat analisa informasi akuntansi keuangan yang cukup baik, akan tetapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan hanya dengan mengandalkan angka rasio - rasio didalamnya, karena meski bisa berguna tetapi angka rasio juga memiliki berbagai keterbatasan sehingga harus digunakan secara hati - hati untuk penilaian baik buruknya kondisi suatu perusahaan.